

**RELEVANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
MEMBENTUK KESADARAN HAM DI MASYARAKAT**

Syarifah Ghizka Safitri¹, Bunga Ria Letisia Sirait², Mawardahny Isyabilla³
sghezka@gmail.com¹, bungaletisia06@gmail.com², mawarsyabillaa1202@gmail.com³
Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan aspek penting dalam kehidupan berbangsa yang perlu ditanamkan sejak dini melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Namun, kesenjangan antara pengetahuan individu dan penerapan di masyarakat masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui penguatan materi dan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual. Penelitian ini menunjukkan bahwa PKn berperan signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran HAM di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pendidikan Kewarganegaraan, Kesadaran Masyarakat, Pendidikan, Nilai Kemanusiaan.

ABSTRACT

Human Rights (HR) are a crucial aspect of national life that must be instilled from an early age through Civic Education. However, the gap between individual knowledge and societal implementation remains a significant challenge that must be addressed through strengthened content and more contextual learning approaches. This study indicates that Civic Education plays a significant role in enhancing public understanding and awareness of human rights, particularly among the younger generation.

Keywords: Human Rights, Civic Education, Public Awareness, Education, Human Values.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak fundamental yang melekat secara inheren pada setiap individu sejak kelahirannya, bersifat universal, serta tidak dapat direnggut atau didegradasi. Di Indonesia, perlindungan terhadap HAM telah terintegrasi dalam kerangka konstitusional melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai instrumen hukum turunannya. Namun, realitas sosial masih menunjukkan adanya kesenjangan implementasi, yang tercermin dari berbagai kasus pelanggaran HAM. Fenomena ini menunjukkan pentingnya memperdalam pemahaman kolektif dan memperkuat kesadaran kritis masyarakat terhadap prinsip-prinsip HAM.

Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran HAM di tengah masyarakat. Sebagai mata pelajaran yang diajarkan di berbagai jenjang pendidikan, PKn tidak hanya memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, serta penghormatan terhadap HAM. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan dan Dewi (2022) dalam jurnal berjudul 'Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Tiang Hak Asasi Manusia' menekankan bahwa PKn memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap HAM. Melalui pembelajaran PKn, peserta didik dapat memahami pentingnya menghormati hak-hak orang lain dan menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Meski demikian, implementasi PKn masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman guru terhadap materi HAM, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pendekatan pembelajaran yang kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn agar dapat berperan lebih efektif dalam membentuk kesadaran HAM di masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara selektif untuk memilih kandidat yang paling sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan penelitian serta pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survey melalui penyebaran kuesioner. Kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep dan implementasi Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) dalam membentuk kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM), serta mengukur persepsi masyarakat.

Untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap relevansi PKn dalam membentuk kesadaran HAM, dilakukan survei menggunakan kuesioner. Kuesioner dirancang dengan menggunakan skala Likert 5 poin, dengan rincian:

- 1 = Sangat Tidak Setuju;
- 2 = Tidak Setuju;
- 3 = Netral;
- 4 = Setuju;
- 5 = Sangat Setuju;

untuk menilai tingkat persetujuan responden terhadap berbagai pernyataan yang berkaitan dengan: Pemahaman masyarakat tentang HAM.

- b. Pandangan masyarakat terhadap peran PKn dalam meningkatkan kesadaran HAM.
- c. Pengalaman pribadi responden terkait pelaksanaan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Kuesioner disebarakan secara daring kepada sampel masyarakat yang dipilih secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan variasi usia, pendidikan, dan latar belakang sosial.

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang membahas:
 Konsep dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.
 Prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia.
 Peran PKn dalam meningkatkan kesadaran HAM di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh melalui wawancara adalah;

Pertanyaan 1: Apa yang membuat anda peduli dengan isu tentang Hak Asasi Manusia?	
Narasumber 1	Untuk kepedulian saya tentang Hak Asasi Manusia dimulai dari pengalaman pribadi saya sendiri. Ketika masih kecil saya tetangga kami yang bekerja sebagai buruh harian sering diperlakukan tidak adil oleh majikannya. Melihat bagaimana dia bekerja keras dari pagi hingga malam namun haknya sebagai pekerja tidak dihormati, membuat saya memahami bahwa setiap manusia, tidak peduli profesi atau latar belakangnya, berhak mendapatkan perlakuan yang bermartabat. Dari situlah saya mulai memahami bahwa hak asasi manusia bukan hanya konsep abstrak tetapi kenyataan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita.
Narasumber 2	Bagi saya, kepedulian terhadap HAM tumbuh dari rasa keprihatinan melihat ketidakadilan yang dialami komunitas di kampung halaman saya. Saya sering bertemu dengan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang harus putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Ada yang harus bekerja membantu orang tua, ada yang menikah di usia dini karena desakan ekonomi. Melihat potensi luar biasa mereka yang terkubur karena keterbatasan akses, membuat saya sadar bahwa pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh dipandang

Untuk hasil penelitian dengan pendekatan Kuantitatif yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner adalah;

Peneliti menggunakan analisis matematis berbasis persentase (%) dari data kuesioner yang kemudian diolah dengan konversi skala Likert menjadi nilai numerik dan dihitung nilai rata-rata (mean) untuk menunjukkan kecenderungan sikap responden terhadap setiap pernyataan. Dimana nilai konversi Skala Likert yang digunakan ialah:

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 Tidak Setuju (TS) = 2

Netral (N) = 3

Setuju (S) = 4

Sangat Setuju (SS) = 5

Dan rumus Rata-Rata (Mean):

$$Mean = \frac{(PSTS \times 1) + (PTS \times 2) + (PN \times 3) + (PS \times 4) + (PSS \times 5)}{100}$$

A. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini didominasi oleh individu berusia 20 tahun (60%), dengan distribusi lainnya adalah usia 19 tahun (26,7%), 21 tahun (6,7%), dan 24 tahun (6,7%). Seluruh responden (100%) menyatakan pernah menerima mata pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam interpretasinya, responden berasal dari kalangan muda, yang merupakan target relevan untuk mengukur dampak pendidikan PKn dalam membentuk kesadaran HAM.

B. Rekap Nilai Rata-Rata (Mean) menurut Data Kuesioner

PERNYATAAN	RATA-RATA
Saya memahami apa itu HAM	4.4
HAM penting dalam kehidupan	4.33
HAM dijamin dalam UUD 1945 dan hukum lainnya	4.47
PKn meningkatkan kesadaran HAM	4.68
Masih ingat materi HAM dalam PKn	4.24
Materi HAM mudah dipahami	4.04
PKn membantu memahami hak dan kewajiban	4.44
PKn perlu diajarkan di semua jenjang	4.46
Menerapkan nilai HAM dalam interaksi	4.44
PKn membentuk karakter menghargai sesama	4.6
Masyarakat memahami pentingnya HAM	3.33
Pelanggaran HAM terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat	4.6
Media massa lebih berperan daripada sekolah	3.6
Materi HAM perlu ditingkatkan dalam kurikulum PKn	4.34

Dengan kesimpulan bahwa mayoritas nilai rata-rata berkisar antara 4.0 – 4.6, menunjukkan tingkat persetujuan yang tinggi hingga sangat tinggi. Dua nilai yang berada di bawah 4 adalah persepsi bahwa masyarakat sekitar telah memahami pentingnya HAM (3.33) dan persepsi bahwa media massa memiliki peran yang lebih besar dalam konteks HAM daripada sekolah, menunjukkan adanya kesenjangan sosial dalam pemahaman HAM.

C. Pemahaman dan Kesadaran tentang HAM

Didapatkan interpretasi bahwa sebagian besar responden memiliki kesadaran normatif dan konseptual tentang HAM. Ini menunjukkan bahwa pendidikan formal telah membekali mereka dengan pengetahuan dasar tentang HAM.

D. Efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia

Didapatkan interpretasi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dipandang efektif dalam membangun pemahaman hak dan kewajiban serta kesadaran akan pentingnya HAM. Keberlangsungan mata pelajaran ini dinilai penting dan fungsional.

E. Relevansi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pendidikan dan Pembentukan Karakter

Didapatkan interpretasi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dipandang oleh responden sebagai bentuk ilmu guna meningkatkan mutu Pendidikan melalui Pembangunan karakter dengan kontinuitas Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan pada seluruh jenjang Pendidikan serta penambahan porsinya. Ada keinginan kuat dari mahasiswa agar HAM menjadi materi yang lebih menonjol dalam PKn, yang menegaskan pentingnya relevansi topik ini dalam konteks sosial dan demokratis saat ini.

F. Persepsi tentang Kesadaran HAM di Masyarakat

Didapatkan interpretasi bahwa meski individu responden menginternalisasi nilai HAM, kesadaran kolektif di masyarakat masih rendah. Ini menunjukkan jurang antara pengetahuan pribadi dan implementasi sosial. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa media memiliki dampak signifikan sebagai penguat atau katalisator pendidikan formal. Pendidikan di kelas saja tidak cukup; informasi melalui media massa turut membentuk kesadaran publik.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terbukti menjadi instrumen strategis dalam membentuk kesadaran individu terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Data yang didapatkan melalui responden menunjukkan bahwa pemahaman konseptual terkait HAM sangat tinggi—87 % menyatakan memahami dan menyadari pentingnya penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari, dengan skor efektivitas PKn sebesar 4,68 dari skala 5. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian El Muhtaj et al. (2022) yang menegaskan bahwa literasi HAM dalam kurikulum PKn di perguruan tinggi secara sistematis meningkatkan

“kecerdasan hak asasi manusia”, serta membentuk kesadaran demokratis bangsa muda Indonesia.

Selain itu, dukungan kuat terhadap integrasi nilai HAM dalam PKn juga tercermin dari penelitian Alda Azzahra et al. (2024), yang menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai alat pencegah pelanggaran HAM. Namun tantangan muncul dari rendahnya dukungan fasilitas dan tenaga pengajar, khususnya di wilayah terpencil, yang menghambat efektivitas program tersebut. Sejalan dengan itu, Noventari et al. (2024) menegaskan pentingnya pendidikan HAM sebagai instrumen untuk membentengi masyarakat multikultural di Indonesia dari potensi pelanggaran, dengan tujuan menumbuhkan sikap saling menghormati antar kelompok beragama.

Disadari pula bahwa pemahaman terhadap HAM tidak cukup jika hanya terjadi di ranah individu; masyarakat luas seringkali belum sepenuhnya menerapkannya. Fenomena ini disoroti oleh Nasution (2022), yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan menjadi urgensi dalam memperkuat demokrasi berkeadaban dan HAM di masyarakat pasca-reformasi, agar tidak terjadi konflik sosial karena rendahnya kesadaran kolektif. Pendekatan pedagogis ini juga didukung oleh penelitian Ridwan dan Dewi (2022) yang menyebut bahwa PKn adalah “tiang HAM” yang mampu meningkatkan pemahaman hak asasi sepanjang kebijakan pendidikan menyertakan elemen HAM secara eksplisit.

Tidak hanya berlaku bagi siswa dan mahasiswa di perkotaan, implementasi PKn dengan perspektif HAM juga penting untuk komunitas adat dan anak-anak di daerah terpencil. Abdin dan Wuarlela (2021) menunjukkan bahwa PKn menyediakan kerangka sosio-kultural untuk memenuhi hak atas pendidikan dan menanamkan nilai HAM meski di wilayah dengan tantangan akses dan infrastruktur, seperti komunitas masyarakat Von di Maluku.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa; Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran individu terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Temuan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa mayoritas responden, yang berasal dari kalangan muda, memiliki pemahaman konseptual dan normatif yang tinggi terhadap HAM berkat pembelajaran PKn yang mereka terima. Nilai-nilai HAM seperti penghormatan terhadap sesama, kesetaraan, dan hak serta kewajiban warga negara terbukti berhasil diinternalisasi melalui pendekatan pedagogis yang digunakan dalam PKn.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan nyata antara kesadaran individu dan kesadaran kolektif masyarakat. Sebagian besar responden menyatakan bahwa pelanggaran HAM masih marak terjadi akibat rendahnya kesadaran sosial. Hal ini menandakan bahwa upaya membangun budaya sadar HAM tidak cukup jika hanya mengandalkan pendidikan formal di ruang kelas. Dibutuhkan pendekatan yang lebih integratif dan kolaboratif, termasuk keterlibatan media massa, komunitas, serta kebijakan kurikulum yang adaptif dan responsif terhadap isu-isu HAM.

Berbagai literatur akademik menguatkan bahwa literasi HAM dalam PKn harus terus dikembangkan, baik dalam konteks perguruan tinggi maupun dalam pendidikan dasar dan menengah. Penguatan kurikulum, pelatihan guru, dan strategi pembelajaran berbasis kontekstual menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang tidak hanya paham hak asasinya, tetapi juga mampu menegakkan dan melindungi hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, relevansi PKn dalam membentuk kesadaran HAM bukan hanya aktual, tetapi juga esensial dalam rangka mewujudkan masyarakat demokratis dan beradab di Indonesia.

SARAN

Untuk meningkatkan peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam membentuk kesadaran HAM, disarankan agar kurikulum PKn diperkuat dengan materi HAM yang lebih aplikatif. Guru dan dosen perlu mendapatkan pelatihan berkala agar mampu mengajarkan HAM secara efektif. Selain itu, kolaborasi antara sekolah, media, dan lembaga masyarakat sipil penting untuk memperluas jangkauan edukasi HAM di luar ruang kelas. Lingkungan pendidikan juga harus menumbuhkan budaya yang menjunjung nilai-nilai HAM dalam praktik sehari-hari. Terakhir, perluasan akses pendidikan PKn ke daerah terpencil menjadi prioritas agar seluruh warga negara memperoleh pemahaman HAM yang merata.

Selain itu, Penulis berharap untuk para penulis analisa kasus serupa selanjutnya agar lebih banyak membaca dan mengumpulkan referensi demi menyempurnakan laporan mini riset dengan materi dan pembahasan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdin, M., & Wuarlela, M. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan HAM dalam Mengembangkan Hak Komunitas Masyarakat Adat Terpencil. *Jurnal Civic Hukum*, 6(2).
- El Muhtaj, M., Siregar, M. F., Pa, R. B. B., & Rachman, F. (2020). Literasi hak asasi manusia dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Jurnal Ham*, 11(3), 369.
- Fadila, A. A., Harahap, P. H., Hasibuan, S. M., Salsanabila, S., Rozi, M. K., & Meliala, R. H. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Alat Pencegah Pelanggaran HAM: Evaluasi Program Pendidikan di Indonesia. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 2(3), 279-288.
- Nadziroh, N. (2016). Peranan pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pilar Pendidikan Hak Asasi Manusia. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 3(1).
- Nafisa, D., Dewi, D. A., & Adriansyah, M. I. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Implikasi dari Hilangnya Nilai Pancasila. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 30-38.
- Nasution, A. R. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2).
- Noventari, W., Ariana, Y., Raharjo, R., & Suryaningsih, A. (2017). Kajian Urgensi Pendidikan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Masyarakat Multikultural di Indonesia. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 17(1), 1-19.
- Ridwan, A., & Dewi, D. A. (2022). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Tiang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 30-37.